BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs), atau dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah serangkaian tujuan yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan total 169 target yang harus dicapai hingga tahun 2030 (UN General Assembly, 2015).

Tujuan Utama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin kehidupan sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia, menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang, mencapai kesetaraan gender, menjamin akses air bersih dan sanitasi untuk semua, energi bersih dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak, membangun industri, inovasi, dan infrastruktur yang tangguh, pengurangan ketimpangan, membangun kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan, memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tindakan terhadap perubahan iklim, melindungi kehidupan di bawah air, kehidupan di darat, mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses ke keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, memperkuat cara pelaksanaan dan menghidupkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.(UNDP, 2016).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Meskipun tujuan SDGs sangat ideal, namun ada tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, seperti kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak juga menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya telah dilakukan untuk mewujudkan SDGs tersebut, salah satunya melalui kewirausahaan.

Kewirausahaan memiliki peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengatasi berbagai tantangan sosial dan lingkungan (Elkington, 1997). Kewirausahaan tidak hanya menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial yang positif, menjadikannya komponen vital dalam upaya global menuju keberlanjutan. Wirausahawan menciptakan peluang dari sumber daya yang mereka miliki dan membangun masa depan secara kolaboratif (Sarasvathy, 2001).

Namun, pencapaian target-target SDGs seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya pemerintah dan mekanisme pasar konvensional yang cenderung berorientasi pada laba jangka pendek (Sachs, 2015). Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial muncul sebagai paradigma baru yang menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi kegagalan pasar melalui model bisnis yang mengutamakan pencapaian nilai sosial (Mair & Martí, 2006). Kewirausahaan sosial mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam satu kerangka bisnis yang berkelanjutan (Dees, 1998; Mair & Martí, 2006). Pelaku kewirausahaan sosial tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan sosial melalui inovasi bisnis yang berdampak luas. Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial muncul sebagai model bisnis transformatif yang mengintegrasikan efisiensi pasar dengan misi pemecahan masalah sosial (Yunus, 2010). Oleh karena itu, pengembangan model kewirausahaan sosial menjadi relevan dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Kewirausahaan sosial adalah proses di mana individu atau organisasi mengidentifikasi masalah sosial dan berusaha menciptakan solusi yang berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Dees (2001) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai kegiatan inovatif yang bertujuan untuk menciptakan nilai sosial melalui pendekatan kewirausahaan. Sementara itu, Mair dan Martí (2006) serta Zahra et al. (2009) menekankan bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi (Achmad, 2024).

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan tujuan sosial untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang mendasari upaya untuk memberikan dampak positif pada masyarakat melalui pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan (Andayani, dkk., 2021). Kewirausahaan sosial berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dengan cara:

1. Menciptakan Lapangan Kerja: Usaha-usaha ini seringkali membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama di daerah yang kurang berkembang.
2. Meningkatkan Keterampilan: Melalui pelatihan dan pendidikan, kewirausahaan sosial membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.
3. Memperkuat Komunitas: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek, kewirausahaan sosial memperkuat ikatan komunitas dan mendorong kolaborasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Kewirausahaan sosial tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang signifikan, menjadikannya alat yang efektif untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kewirausahaan sosial telah menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan tujuan sosial ke dalam model bisnis, kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada keuntungan

finansial, tetapi juga pada dampak positif bagi masyarakat (Battilana dan Dorado, 2010).

Untuk mewujudkan kewirausahaan sosial, dukungan ekosistem kewirausahaan terhadap kewirausahaan sosial sangat penting karena keduanya saling terkait dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif (Isenberg, 2010; Acs, dkk., 2014). Ekosistem yang tangguh mencakup dukungan kebijakan, akses pendanaan, budaya kewirausahaan, dan jaringan pendukung yang saling terkoneksi. Pemerintah terus menggencarkan supaya masyarakat memiliki minat untuk melakukan wirausaha. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan ekosistem berwirausaha. Meskipun terdapat upaya signifikan untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu:

1. Minimnya Kesadaran Kewirausahaan: Banyak pemuda masih melihat kewirausahaan sebagai pilihan karir yang kurang menarik dibandingkan pekerjaan tetap atau pegawai negeri sipil.
2. Akses Terbatas ke Modal: Banyak wirausaha muda menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.
3. Infrastruktur yang Belum Memadai: Sarana pelatihan dan dukungan teknis masih kurang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, menghambat potensi pengembangan kewirausahaan (Bappenas, 2020; Kharisma & Lestari, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Diperlukan suatu ekosistem kewirausahaan yang kondusif, yaitu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya wirausaha melalui interaksi aktor, kebijakan, sumber daya, dan nilai-nilai yang saling memperkuat (Isenberg, 2011). Mason dan Brown (2014) menyebut bahwa hubungan antara faktor internal (seperti talenta dan budaya) dan eksternal (seperti regulasi dan pasar) sangat menentukan vitalitas ekosistem. Stam

(2015) kemudian memperluas pemahaman ini dengan menambahkan dimensi interaksi antar elemen dan pentingnya keberlanjutan dalam pertumbuhan kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan sosial, keberadaan ekosistem yang kuat dan terintegrasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas para wirausahawan sosial untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi sekaligus. Ekosistem kewirausahaan mencakup semua elemen yang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan wirausaha. Elemen-elemen yang membentuk ekosistem tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM): Individu yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha (Stam, 2015).
2. Infrastruktur: Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kewirausahaan, seperti akses ke modal, pelatihan, dan teknologi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).
3. Kelembagaan: Peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kewirausahaan. Regulasi yang mendukung, termasuk penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal, akan mempermudah tumbuhnya bisnis baru. Dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi elemen penting dalam mendorong keberlanjutan usaha (World Economic Forum, 2014).

Di Indonesia, potensi pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merupakan aset strategis nasional. HIPMI memegang peranan krusial sebagai katalisator pengusaha muda. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas dari tingkat pusat hingga daerah, HIPMI memiliki kapasitas untuk menjadi *enabler* utama dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan sosial. Peran HIPMI dalam memberikan mentoring, akses ke sumber daya, dan advokasi kebijakan menjadi variabel kunci yang dapat mempercepat akselerasi kontribusi pengusaha muda terhadap SDGs. Hal ini sejalan dengan teori bahwa organisasi profesi berperan penting dalam mentransfer modal sosial bagi anggotanya (North, 1990).

Namun demikian, peran HIPMI dalam mendorong kewirausahaan sosial masih belum optimal dan cenderung lebih berfokus pada kewirausahaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

konvensional yang berorientasi profit. Padahal, dengan jaringan nasional yang luas dan pengaruh kebijakan yang kuat, HIPMI memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang terintegrasi. Transformasi pengusaha muda dari orientasi murni komersial menuju kewirausahaan sosial memerlukan dukungan lingkungan yang sistemik. Hal ini sejalan dengan Model Ekosistem Isenberg (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan kewirausahaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh pilar kebijakan, keuangan, budaya, dan modal manusia yang saling berinteraksi.

Permasalahan muncul ketika integrasi antara dukungan pemerintah, peran institusi organisasi, dan karakteristik individu pengusaha belum mampu menghasilkan dampak sosial yang terukur secara signifikan. Berdasarkan Triple Helix Model (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi seringkali hanya bersifat teknis-birokratis dan mengabaikan dimensi nilai yang mendasar. Padahal, bagi pengusaha di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, dimensi spiritualitas merupakan penggerak utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 2008).

Ekosistem kewirausahaan sosial sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktor, institusi, kebijakan, serta faktor pendukung yang saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan sosial (Isenberg, 2011; Stam, 2015). Dalam konteks ini, keberhasilan ekosistem sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya karakteristik kewirausahaan sosial, dukungan organisasi seperti HIPMI, serta dukungan eksternal berupa kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, dan lingkungan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Karakteristik kewirausahaan sosial menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan dalam menjalankan usaha berbasis sosial. Karakteristik tersebut meliputi inovasi sosial, orientasi pada misi sosial, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan mengelola sumber daya secara efektif (Bornstein, 2004; Zahra et al., 2009). Tanpa karakteristik ini, pelaku usaha cenderung sulit menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

HIPMI berperan sebagai wadah strategis untuk mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). HIPMI, yang didirikan pada tahun 1972, bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dengan lebih dari 25.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, HIPMI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta inovasi sosial. Melalui program-program, seperti HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI-PT), organisasi ini berusaha untuk menjembatani antara pendidikan formal di perguruan tinggi dan praktik kewirausahaan.

HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan nasional. Meskipun orientasi utama HIPMI adalah pengembangan wirausaha, banyak anggotanya yang mulai mengintegrasikan misi sosial dalam usaha mereka, menjadikannya bagian dari gerakan kewirausahaan sosial (Y. Santoso & L. Arifin, 2022; Setiawan & Habibi, 2020). Namun, secara struktural dan institusional, pendekatan kewirausahaan sosial dalam HIPMI belum terstandarisasi atau terdokumentasi dengan baik. Sebagian besar program pelatihan, inkubasi, atau pendampingan kewirausahaan masih berorientasi pada pencapaian ekonomi (Rahman, 2021). Keterkaitan langsung antara program HIPMI dan target SDGs pun masih bersifat implisit (D. Haryanto, 2023). Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Miswanto (2020) dan Sutanto (2022) menunjukkan bahwa HIPMI berperan dalam pembinaan wirausaha melalui pelatihan dan penguatan jaringan. Peran kelembagaan ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha sosial serta membuka akses terhadap peluang pasar dan pembiayaan (Acs et al., 2017). Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana HIPMI dapat membangun model ekosistem kewirausahaan sosial yang selaras dengan indikator SDGs.

Selain itu, dukungan eksternal seperti pendanaan, akses pasar, jaringan sosial, dan kebijakan pemerintah sering disebut sebagai faktor penting untuk pertumbuhan wirausaha sosial (Corner & Ho, 2010; Zahra et al., 2009). Tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

dukungan eksternal yang memadai, ekosistem kewirausahaan sosial akan sulit berkembang secara optimal (Stam, 2015). Meskipun demikian, penelitian tentang pengaruh dukungan eksternal terhadap kontribusi wirausaha sosial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan masih jarang, khususnya di konteks Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam memahami mekanisme bagaimana kombinasi karakteristik wirausaha sosial, peran institusi HIPMI, dan dukungan eksternal dapat membentuk ekosistem kewirausahaan sosial yang efektif.

Ketiga variabel tersebut di atas secara simultan membentuk ekosistem kewirausahaan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem yang efektif akan mampu menciptakan sinergi antar aktor, meningkatkan inovasi sosial, serta memperluas dampak usaha terhadap masyarakat. Selanjutnya, ekosistem ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja layak, dan pembangunan ekonomi inklusif.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendekatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam, khususnya konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah (M). Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai kerangka moderasi dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial masih sangat sedikit diteliti (Jaelani, 2029; Arsyad, 2023). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek keberlanjutan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga memberikan nilai tambah normatif dan praktis pada studi kewirausahaan sosial di Indonesia. Gap penelitian (*research gap*) ini menunjukkan perlunya sebuah model baru yang tidak hanya mengandalkan ekosistem material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Maqāṣid al-Sharīʿah sebagai landasan etis.

Maqāṣid al-Sharīʿah dalam perspektif sistem (Auda, 2008) dipandang mampu menjadi kompas yang mengarahkan ekosistem kewirausahaan sosial di HIPMI untuk mencapai kemaslahatan publik (*maslahah ammah*) yang selaras dengan indikator SDGs. Dengan mengadopsi prinsip Maqasid Syariah, ekosistem kewirausahaan sosial di lingkungan HIPMI diharapkan mampu menghasilkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

dampak yang lebih holistik, di mana pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan penjagaan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas (Chapra, 2008).

Terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi, di antaranya adalah ketiadaan model konseptual dan empiris yang secara khusus mengkaji ekosistem kewirausahaan sosial berbasis organisasi seperti HIPMI, kurangnya model integratif yang menghubungkan karakteristik kewirausahaan sosial (X1), peran institusi HIPMI (X2), dan dukungan eksternal (X3) terhadap ekosistem kewirausahaan sosial (Y1) dan kontribusinya pada SDGs (Y2) dengan perspektif moderasi Maqāṣid al-Sharī‘ah (M), serta minimnya pendekatan kuantitatif menggunakan model struktural seperti *Structural Equation Modelling* (SEM) dalam menganalisis efektivitas peran ekosistem kewirausahaan sosial tersebut.

Meskipun potensi HIPMI sangat besar, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana model ekosistem yang ideal dapat dibangun untuk mengoptimalkan peran pengusaha muda dalam mendukung SDGs, khususnya dengan memadukan nilai-nilai Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan model strategis ekosistem kewirausahaan sosial yang mampu mensinergikan dukungan eksternal, karakteristik kewirausahaan sosial, dan peran organisasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian SDGs dengan landasan nilai Maqāṣid al-Sharī‘ah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun model konseptual yang holistik dan kontekstual untuk mendorong kewirausahaan sosial di Indonesia, serta menghubungkannya secara sistemik dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan SEM, penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara berbagai variabel seperti dukungan organisasi, kolaborasi multi-sektor, karakteristik kewirausahaan sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model kewirausahaan sosial berbasis ekosistem dan nilai Islam, serta kontribusi praktis

bagi HIPMI, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Kelompok Pengaruh Langsung (*Direct Effect*), Kelompok Pengaruh Mediasi (*Indirect Effect*), dan Kelompok Pengembangan Model (*Novelty*). Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

I. Kelompok Pengaruh Langsung (Direct Effect)

a. Bagaimana pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqasid Syariah (M)?
b. Bagaimana pengaruh Peran HIPMI (X2) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqasid Syariah (M)?
c. Bagaimana pengaruh Dukungan Eksternal (X3) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqasid Syariah (M)?
d. Bagaimana pengaruh Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) terhadap Kontribusi SDGs (Y2) dan Maqasid Syariah (M)?
e. Bagaimana pengaruh Maqasid Syariah (M) terhadap Kontribusi SDGs (Y2)?

2. Kelompok Pengaruh Mediasi (Indirect Effect)

f. Apakah Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) memediasi pengaruh Karakteristik KS (X1), Peran HIPMI (X2), dan Dukungan Eksternal (X3) terhadap Kontribusi SDGs (Y2)?
g. Apakah Maqasid Syariah (M) memediasi pengaruh Karakteristik KS (X1), Peran HIPMI (X2), dan Dukungan Eksternal (X3) terhadap Kontribusi SDGs (Y2)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

h. Bagaimana peran berjenjang (*sequential mediation*) Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) dan Maqasid Syariah (M) dalam menghubungkan faktor eksogen (X1, X2, X3) terhadap pencapaian SDGs (Y2)?

3. ***Kelompok Pengembangan Model (Novelty)***

i. Bagaimana model ekosistem kewirausahaan yang dapat dibangun oleh HIPMI untuk mendukung kewirausahaan sosial dalam mewujudkan SDGs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Langsung (Direct Effect)

a. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqāṣid al-Sharīʿah (M).
b. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Peran HIPMI (X2) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqāṣid al-Sharīʿah (M).
c. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Dukungan Eksternal (X3) terhadap Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1), Kontribusi SDGs (Y2), dan Maqāṣid al-Sharīʿah (M).
d. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) terhadap Kontribusi SDGs (Y2) dan Maqāṣid al-Sharīʿah (M).
e. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Maqāṣid al-Sharīʿah (M) terhadap Kontribusi SDGs (Y2).

2. Menganalisis Pengaruh Mediasi (Indirect Effect)

f. Untuk menguji dan menjelaskan peran Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) dalam memediasi pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Sosial (X1), Peran HIPMI (X2), dan Dukungan Eksternal (X3) terhadap Kontribusi SDGs (Y2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

g. Untuk menguji dan menjelaskan peran Maqāṣid al-Sharīʿah (M) dalam memediasi pengaruh Karakteristik KS (X1), Peran HIPMI (X2), dan Dukungan Eksternal (X3) terhadap Kontribusi SDGs (Y2).
h. Untuk menganalisis peran berjenjang (*sequential mediation*) antara Ekosistem Kewirausahaan Sosial (Y1) dan Maqāṣid al-Sharīʿah (M) dalam menghubungkan faktor eksogen terhadap pencapaian SDGs (Y2).

3. Pengembangan Model (Contribution to Knowledge)

i. Untuk merumuskan dan mengonstruksi model ekosistem kewirausahaan sosial sebagai model strategis bagi HIPMI dalam mengintegrasikan peran institusi, dukungan eksternal, dan nilai-nilai spiritual untuk mengakselerasi pencapaian SDGs.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kewirausahaan sosial dan ekosistem kewirausahaan. Secara teoritis, manfaat penelitian ini antara lain:

a. Menambah khazanah keilmuan mengenai kewirausahaan sosial dalam konteks organisasi kepengusahaan di negara berkembang, yang masih relatif kurang dikaji secara mendalam.
b. Mengembangkan model ekosistem kewirausahaan sosial berbasis HIPMI, yang merupakan pendekatan baru dalam mengintegrasikan kewirausahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
c. Memberikan dasar konseptual dan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas ekosistem kewirausahaan sosial melalui pendekatan kuantitatif, seperti Structural Equation Modeling (SEM).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

a. Bagi HIPMI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan strategis dalam merancang program-program kewirausahaan sosial yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap masyarakat dan pencapaian SDGs.
b. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, model ekosistem yang dikembangkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis sosial serta mendorong sinergi antara sektor publik dan komunitas wirausaha.
c. Bagi wirausaha muda dan pelaku kewirausahaan sosial, penelitian ini memberikan pemahaman tentang elemen-elemen penting yang mendukung keberhasilan usaha sosial, serta strategi kolaborasi yang dapat meningkatkan dampak sosial.
d. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini membuka peluang pengembangan studi lanjutan di bidang kewirausahaan sosial, terutama dalam konteks lokal Indonesia dan pengaruhnya terhadap indikator-indikator pembangunan berkelanjutan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat secara sistematis untuk memberikan struktur yang jelas dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Bab I Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis dan Kerangka Pemikiran membahas tentang Kajian Teori yang terdiri dari *Grand, Middle, dan Applied Theory*, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Ekosistem Kewirausahaan, Kewirausahaan Sosial, Integrasi Maqashid Syariah dengan Kewirausahaan Sosial dan SDGs, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran serta Hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian membahasa tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Statistik Deskriptif, Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*), Analisis Model Struktural (*Inner Model*), Uji Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan Keterbatasan Penelitian, Saran, dan Rekomendasi Kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN